



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI  
RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2021 - 2022  
KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
18 - 22 April 2022**

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

**JAKARTA 2021**



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI**  
**RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2021-2022**  
**KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**18 - 22 April 2022**

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
  - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
  - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal April 2022.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 16 Maret 2022.

**B. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kunjungan melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Kalimantan Timur adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan dalam rangka melaksanakan salah satu dari tiga fungsi DPR RI, yaitu fungsi pengawasan.

**C. TUJUAN**

1. Melihat dan mendengarkan penjelasan dari Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait progress Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, terutama di Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Melihat dan mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, *stakeholder* di bidang Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan, sehubungan dengan fungsi

pengawasan Komisi IV DPR RI di Provinsi Kalimantan Timur, terutama terkait:

- a. Pelaksanaan program Desa Korporasi Sapi di Kabupaten Penajam Paser Utara, terutama di Desa Labangka Barat, Kecamatan Babulu;
- b. Ketersediaan pangan di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Balikpapan terutama dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional;
- c. Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Kesiapan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kelas I Balikpapan dalam melaksanakan tupas pokok dan fungsinya; serta
- e. Permasalahan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur dalam mendukung tercapainya target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

## **II. SUSUNAN TIM**

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI) serta para Anggota Komisi IV DPR RI.

## **III. PELAKSANAAN**

### **A. PELAKSANAAN DAN LOKASI KUNJUNGAN**

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan pada tanggal 18 - 22 April 2022, dengan lokasi kunjungan sebagai berikut:

1. Titik Nol Kilometer, lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta Persemaian Mentawir di Kawasan IKN Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Lokasi Program Desa Korporasi Sapi Kelompok Tani Petani Maju, Desa Labangka Barat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Gudang BULOG Klandasan Ilir, Kota Balikpapan; dan
4. Kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kelas I Balikpapan, Kota Balikpapan.

### **B. GAMBARAN UMUM**

#### **1. Profil Provinsi Kalimantan Timur**

Kalimantan Timur adalah sebuah Provinsi Indonesia di Pulau Kalimantan bagian ujung timur yang berbatasan dengan Malaysia, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi. Luas total Kalimantan Timur adalah 127.346,92 km<sup>2</sup> dan populasi sebesar 3.793.152 jiwa (2020). Kalimantan Timur merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah keempat di nusantara. Ibu kota provinsi ini adalah kota Samarinda.

Provinsi Kalimantan Timur sebelum dimekarkan menjadi Kalimantan Utara merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Papua, dengan

luas 194.489 km<sup>2</sup> yang hampir sama dengan Pulau Jawa atau sekitar 6,8% dari total luas wilayah Indonesia.

Sebelumnya Kalimantan Timur merupakan salah satu karesidenan dari Provinsi Kalimantan. Sesuai dengan aspirasi rakyat, sejak tahun 1956 wilayahnya dimekarkan menjadi tiga Provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Pada tahun 2012, kembali terjadi pemekaran wilayah yang ditandai dengan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

Daerah-daerah Tingkat II di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Diarsipkan 2007-09-28 di *Wayback Machine* tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 9).

Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959 terdiri atas:

- a. Pembentukan 2 kotamadya, yaitu:
  - 1) Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda sebagai ibu kotanya dan sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur; dan
  - 2) Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibu kotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
- b. Pembentukan 4 kabupaten, yaitu:
  - 1) Kabupaten Kutai, dengan ibu kotanya Tenggarong;
  - 2) Kabupaten Paser, dengan ibu kotanya Tanah Grogot;
  - 3) Kabupaten Berau, dengan ibu kotanya Tanjung Redeb; dan
  - 4) Kabupaten Bulungan, dengan ibu kotanya Tanjung Selor.

### **Pembentukan Kota dan Kabupaten Baru**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981, maka dibentuk Kota Administratif Bontang di wilayah Kabupaten Kutai dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, maka dibentuk pula Kota Madya Tarakan di wilayah Kabupaten Bulungan. Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah Diarsipkan 2007-10-08 di *Wayback Machine*, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu:

- a. Kabupaten Kutai Barat, beribu kota di Sendawar;
- b. Kabupaten Kutai Timur, beribu kota di Sangatta;
- c. Kabupaten Malinau, beribu kota di Malinau;
- d. Kabupaten Nunukan, beribu kota di Nunukan;
- e. Kabupaten Mahakam Ulu beribu kota di Ujoh Bilang;
- f. Kota Tarakan (peningkatan kota administratif Tarakan menjadi kotamadya); dan
- g. Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kotamadya).

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2002, maka Kabupaten Paser mengalami pemekaran dan pemekarannya bernama Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tanggal 17 Juli 2007, DPR RI

sepakat menyetujui berdirinya Tana Tidung sebagai kabupaten baru di Kalimantan Timur, maka jumlah keseluruhan kabupaten/kota di Kalimantan Timur menjadi 14 wilayah. Pada tahun yang sama, nama Kabupaten Pasir berubah menjadi Kabupaten Paser berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2007.

Pada tanggal 25 Oktober 2012, DPR RI mengesahkan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran dari Kalimantan Timur. Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan menjadi wilayah provinsi baru tersebut, sehingga jumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur berkurang menjadi 9 wilayah. Pada bulan Mei 2013 Kabupaten Mahakam Ulu dimekarkan dari Kutai Barat sehingga kabupaten dan kota di Kalimantan Timur menjadi 10 wilayah.

### **Topografi**

Dilihat dari topografi, sebagian besar atau 43,35 persen wilayah daratan termasuk dalam kemiringan di atas 40 persen persen dan 43,22 persen terletak pada ketinggian 100-1000 m di atas permukaan laut, sehingga pemanfaatan lahan di Provinsi Kalimantan Timur harus memperhatikan karakteristik lahan tersebut.

Sebagai provinsi terluas kedua setelah Papua, Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi sumberdaya alam melimpah dimana sebagian besar potensi tersebut belum Sumberdaya alam dan hasil-hasilnya sebagian besar diekspor keluar negeri, sehingga Provinsi ini merupakan penghasil devisa utama bagi negara, khususnya dari sektor Pertambangan, Kehutanan dan hasil lainnya. Hasil utama provinsi ini adalah hasil tambang seperti minyak, gas alam dan batu bara. Sektor lain yang kini sedang berkembang adalah agrikultur, pariwisata dan industri pengolahan. Beberapa daerah seperti Balikpapan dan Bontang mulai mengembangkan kawasan industri berbagai bidang demi mempercepat pertumbuhan perekonomian.

## **2. Profil Kabupaten Paser Penajam Utara**

Penajam Paser Utara merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pasir (kini Paser) pada tahun 2002. Sebagian dari daerah kabupaten ini dan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk dijadikan lokasi Ibukota Negara (IKN) baru dan telah memiliki payung hukum, seperti halnya Jonggol, Bogor yang ditunjuk sebagai kandidat Ibukota Negara (IKN) oleh Presiden Soeharto pada tahun 1994, tetapi kandas bersamaan dengan runtuhnya rezim Orde Baru. Rencananya lokasi pusat pemerintahan negara akan berdiri di Kecamatan Sepaku yang secara geografis berdekatan dengan Kota Balikpapan.

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki Sumber Daya Alam yang cukup banyak dan beragam, baik sumber daya hutan berikut hasil ikutannya, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan serta Kehutanan. Potensi ekonomi tersebut merupakan peluang bagi penduduk

untuk menambah pendapatan mereka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **3. Profil Kota Balikpapan**

Kota Balikpapan memiliki wilayah 85% berbukit-bukit serta 12% berupa daerah datar yang sempit terutama berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sungai kecil serta pesisir pantai. Dengan kondisi tanah yang bersifat asam (gambut) serta dominan tanah merah yang kurang subur. Sebagaimana layaknya wilayah lain di Indonesia, kota ini juga beriklim tropis. Kota ini berada di pesisir timur Kalimantan yang langsung berbatasan dengan Selat Makassar, memiliki teluk yang dapat dimanfaatkan sebagai pelabuhan laut komersial dan pelabuhan minyak.

### **4. Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur**

Upaya pemindahan Ibu kota Indonesia dimulai pada tahun 2019 pada masa kepresidenan Joko Widodo. Melalui rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019, Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibukota negara ke luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024.

Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ibu kota baru tersebut akan dinamai Penajam.

Kepindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan dilakukan bukan tanpa alasan. Sejumlah faktor menjadi alasan kepindahan IKN. Sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan kontribusi ekonomi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, yakni sebesar 59%. Alasan diperkuat pula oleh terjadinya krisis ketersediaan air di Pulau Jawa, terutama di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Pulau Jawa juga tercatat mengalami konversi lahan terbesar di antara gugus pulau lain di Indonesia. Adapun tren konversi lahan tersebut diperkirakan akan masih terus berlanjut. penduduk yang tinggi juga menjadi urgensi perpindahan IKN ini. Belum lagi pada aspek lingkungan yang sangat memprihatinkan. Diketahui bahwa muka air tanah Jakarta turun sekitar 7,5-10 sentimeter per tahun. Data tersebut juga diikuti dengan sekitar 57% kualitas air waduk tercemar berat dan 61% air sungai yang tercemar berat. Parahnya lagi, diperkirakan akan terjadi kenaikan muka air laut sekitar 25-50 sentimeter pada tahun 2050 di Jakarta.

Selanjutnya, pemilihan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN Nusantara adalah berdasarkan Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara, terdapat 9 alasan mengapa IKN dipindahkan ke Kalimantan Timur, yaitu:

- a. Memiliki aksesibilitas lokasi tinggi yang dekat dengan dua kota besar, yaitu Balikpapan dan Samarinda;
- b. Memiliki struktur kependudukan heterogen dan terbuka dengan potensi konflik yang rendah;

- c. Pertahanan wilayah dapat didukung oleh adanya Tri Matra Darat, Laut dan Udara;
- d. Kemampuan lahan sedang untuk konstruksi bangunan;
- e. Lokasi dinilai aman dan minim dari bencana alam;
- f. Memiliki lahan yang luas serta berstatus Hutan Produksi (HP) dan perkebunan;
- g. Dilengkapi dengan infrastruktur utama, yakni Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan Trans Kalimantan, Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian dan Bandar Udara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau Balikpapan, dan Pelabuhan Semayang Samarinda;
- h. Tersedia air baku dari 3 waduk eksisting, 2 waduk yang direncanakan, 4 sungai dan 4 Daerah Aliran Sungai (DAS), serta
- i. Berada di Jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II Selat Makassar yang berkontribusi untuk memperlancar kegiatan pelayaran dan penerbangan internasional.

Proses pembangunan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dimulai pada tahun 2022. Berbagai rancangan pembangunan IKN baru tersebut telah disiapkan dan diundangkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada 15 Februari 2022 (UU IKN). Direncanakan, wilayah IKN Nusantara meliputi daratan seluas 256.142 hektare dan perairan laut seluas 68.189 hektare. Terdapat 5 tahapan pembangunan yang dirancang, mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2045, tepat pada peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke 100 tahun.

**Tahap pertama pada tahun 2022-2024.** Pembangunan IKN tahap ini akan dibagi dalam tiga alur kerja besar, yakni pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Selain itu, perumahan dalam bentuk rumah tapak maupun unit apartemen untuk ASN, TNI, Polri dan BIN juga akan dibangun di tahap satu. Sedangkan untuk relokasinya, TNI, Polri dan BIN akan direlokasikan pada 2023 dan disusul oleh badan eksekutif, legislatif, yudikatif dan ASN pada awal tahun 2024. Proses pembangunan IKN tahap satu dinyatakan tercapai ketika perpindahan ASN telah dimulai. Namun, sebelum relokasi dilakukan, IKN akan didominasi oleh pekerja konstruksi dan pertahanan keamanan.

**Tahap kedua pada tahun 2024-2029.** Pada tahap ini, infrastruktur utama ditargetkan telah siap dihubungkan ke kawasan baru. Diketahui bahwa pada 2023-2025 juga akan dimulai pembangunan fasilitas litbang, perguruan tinggi kelas dunia, pusat inovasi dan fasilitas kesehatan internasional. Selain itu, di tahap dua ini diharapkan fasilitas transportasi umum primer maupun sekunder ditargetkan siap dipakai.

**Tahap ketiga pada tahun 2030-2034.** Di tahap ini, sejumlah infrastruktur ditargetkan telah rampung seperti angkutan umum masal, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dan fasilitas penunjang kota spons. Tidak hanya itu, di tahap ini juga

ditargetkan telah tersedia pengolahan sampah dan penambahan amenities digital serta perkotaan.

**Tahap keempat pada tahun 2035-2039.** Dilaksanakan dengan dimulainya perkembangan pesat di bidang pendidikan dan kesehatan yang akan menjadi motor penggerak sektor ekonomi lain di IKN. Misalnya adalah pembangunan kereta api regional dan pembangunan bendungan multiguna untuk memastikan ketersediaan air di wilayah tersebut.

**Tahap kelima pada tahun 2040-2045.** Diharapkan pada tahap ini, pengembangan IKN telah mencapai puncak yang ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang stabil, Populasi Kawasan IKN (KIKN) dicanangkan akan mencapai 1,7 juta-1,9 juta jiwa dengan kepadatan kawasan perkotaan sekitar 100 jiwa per hektare. Jumlah tersebut tentunya didukung oleh infrastruktur yang telah terbangun secara menyeluruh untuk masyarakat.

Pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN mencapai Rp466 triliun yang akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp89,4 triliun. Sejumlah Rp253,4 triliun berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta Rp123,2 triliun lain berasal dari swasta. Adapun sumber pendanaan lain IKN yang telah diatur dalam UU berasal dari APBN, KPBU, partisipasi badan usaha yang sebagian atau seluruh modal telah dimiliki negara, pembiayaan internasional, *creative financing* dan pemanfaatan barang milik negara.

## 5. Program Desa Korporasi Sapi

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara pembangunan sub sektor peternakan dilaksanakan melalui pendekatan sistem agribisnis yang orientasinya pada peningkatan daya saing, pengembangan usaha ekonomi rakyat yang berkelanjutan serta dilaksanakan dalam kerangka otonomi untuk memperkuat pembangunan Penajam Paser Utara. Program pembangunan peternakan berwawasan agribisnis pada hakekatnya merupakan upaya untuk menggerakkan mata rantai agribisnis mulai dari hulu sampai hilir secara berkesinambungan, efektif dan efisien guna menghasilkan produk peternakan yang memiliki nilai tambah ekonomis dan daya saing yang tinggi sehingga diharapkan mampu berkompetisi di pasar regional dan pasar nasional.

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan akan gizi protein hewani masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara yang berasal dari ternak besar seperti sapi dan kerbau, sampai saat ini masih sekitar 70% ternak potong didatangkan dari kabupaten bahkan dari luar daerah seperti Sulawesi, Donggala, Mataram dan lain-lain.

Kemudian untuk menuju pada pemenuhan akan gizi masyarakat yang berasal dari protein hewani maka pembangunan subsektor peternakan di Kabupaten Penajam Paser Utara perlu mendapat perhatian khusus bahkan ditingkatkan dalam upaya peningkatan produksi dan produktifitas peternakan. Model pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan wilayah secara makro yang ditujukan untuk pemberdayaan

ekonomi kerakyatan dengan terwujudnya sentra agribisnis berbasis peternakan sesuai kompetensi dimasing-masing wilayah kecamatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah.

Dengan ditetapkannya Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Ibukota Negara Baru kedepan pemenuhan kebutuhan pangan akan menjadi hal strategis untuk dipikirkan khususnya untuk komoditas daging sapi sebagai salah satu sumber protein hewani bagi masyarakat IKN baru nantinya. Seiring dengan hal tersebut, maka Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dinas Pertanian pada Tahun 2021 dipercaya sebagai salah satu lokasi kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi.

Kalimantan Timur mempunyai peluang yang sangat besar dalam usaha pengembangan sapi potong mengingat permintaan pasar yang relatif besar. Hal ini ditinjau dari berbagai potensi seperti agroklimat dan luas lahan, bebas penyakit dan beberapa regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Upaya-upaya teknis untuk meningkatkan produktivitas dan reproduktivitas telah dilakukan pemerintah Kalimantan Timur seperti efisiensi perbibitan dan peningkatan efisiensi penggemukan dan pembinaan kelompok usaha peternakan rakyat.

Untuk mendukung usaha tersebut pemerintah Kaltim telah menetapkan kawasan atau daerah pengembangan agribisnis sapi potong. Selain itu pemerintah juga memfasilitasi akses peternak kepada perbankan/lembaga keuangan dan menciptakan struktur pasar yang lebih kompetitif. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha sapi potong baik penghasil bibit maupun penggemukan adalah faktor bibit, pakan dan manajemen pemeliharaan.

### **Tujuan**

Tujuan pengembangan ternak sapi melalui Program Pengembangan Desa Korporasi Sapi ini agar supply komoditas sapi potong dan produknya di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat terpenuhi dan tentunya akan mengurangi ketergantungan dari daerah lain. Disamping itu juga agar masyarakat peternak menjadi lebih sejahtera dengan keberhasilan program nantinya akan berdampak pada tingkat pendapatan peternak.

### **Pelaksanaan Kegiatan Desa Korporasi Sapi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)**

Untuk pembangunan kandang baik kandang indukan maupun kandang bakalan dilakukan secara swakelola oleh kelompok tani penerima manfaat dengan dana bantuan untuk stimulan sebesar Rp182.098.000,00 (seratus delapan puluh dua juta Sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang di berikan dalam dua tahap Tahap I 70% sebesar Rp128.035.600,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan Tahap II 30 % sebesar Rp54.872.400,00 (lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah). Adapun untuk pengolahan dan pemanfaatan kotoran sapi maka masing-masing kelompok di lengkapi

dengan digester pengolahan biogas 17 M<sup>3</sup> dan dilengkapi peralatan fasilitas pengolahan pupuk padat dan pupuk cair. Diharapkan kelompok mendapatkan manfaat energi biogas dan hasil penjualan pupuk padat maupun pupuk cairnya. Dalam rangka mendukung output yang dihasilkan digester biogas yaitu bioslurry baik padat maupun cair maka pada kegiatan ini dilengkapi dengan pembangunan rumah kompos dan shelter penyimpanan pupuk dengan dana stimulan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per kelompok yang dilakukan secara swakelola.

Selanjutnya, dalam rangka perluasan lahan kebun HPT untuk mendukung penyediaan pakan bagi ternak maka kelompok telah menyiapkan lahan seluas 24,5 hektar siap tanam. Bibit HPT di dapatkan baik secara swadaya, bantuan bibit dari kelompok pembibit lainnya dan hibah dari BPTU HPT Pelaihari. Jenis rumput yang dibudidayakan berupa king grass, odotan, pakchong, indigofera dan lainnya. Untuk stimulan operasional penanaman di bantu oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Kalimantan Timur seluas 4 hektar dengan biaya Rp. 10.000.000/hektar. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan 1 unit mesin chopper kapasitas 4 ton/jam kepada masing-masing kelompok sehingga rumput yang di chopper akan lebih meningkatkan palatabilitas saat diberikan kepada ternak pada saat kegiatan proses pencacahan rumput dan limbah pertanian/perkebunan.

Kemudian, pemasaran ternak terutama untuk program penggemukan dilakukan dengan sistem timbang sehingga masing-masing kelompok mendapat alokasi 1 unit timbangan digital. Pakan tambahan berupa konsentrat sangat diperlukan untuk melengkapi pakan hijauan. Distribusi pakan konsentrat sebanyak 180 ton konsentrat indukan (36 Ton per kelompok) dan 100 Ton konsentrat bakalan (20 Ton per kelompok). Saat ini konsentrat sudah mulai diberikan kepada sapi indukan maupun bakalan yang sudah terdistribusi di kandang masing-masing kelompok.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur memberikan dukungan dalam Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi di Kabupaten Penajam Paser Utara berupa instalasi air berupa menara, 2 tandon dan pompa sebanyak 12 unit. Untuk membantu unloading dan pengeluaran sapi nantinya juga dibangun sarana gangway di masing-masing kelompok. Hal ini akan memudahkan mobilisasi sapi dan juga memenuhi kebutuhan air baik untuk air minum sapi maupun untuk membersihkan kandang.

Untuk menjaga ternak dari penyakit kegiatan ini juga dilengkapi dengan distribusi obat-obatan berupa paket obat-obatan, mineral dan vitamin, Obat cacing dan desinfektan serta sprayer elektrik. Dari dukungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur juga mendistribusikan obat-obatan untuk melengkapi dan memperkuat kegiatan pelayanan pengobatan ternak dan pengendalian penyakit ternak agar ternak yang ada senantiasa sehat dan dapat berproduksi dengan optimal.

Sebagai langkah menjamin keberlanjutan kegiatan pengembangan Desa Korporasi Sapi maka harus dibuat strategi perencanaan yang matang

dengan menetapkan rencana aksi 5 tahun mendatang yaitu Tahun 2022 sampai dengan 2026. Rencana Aksi berisi program dan kegiatan yang dibutuhkan selama Pengembangan Desa Korporasi Sapi yang sebagai referensi perencanaan program dan kegiatan bagi penentu kebijakan baik di tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten demikian pula termasuk didalamnya peran swasta melalui CSR-nya dan swadaya peternak/koperasi.

## **6. BKIPM Kelas I Balikpapan**

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Balikpapan (BKIPM Kelas I Balikpapan) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.25/MEN/2011 tanggal 26 September 2011 sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM).

BKIPM Kelas I Balikpapan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya hama dan penyakit ikan ke dan dari wilayah Negara atau antar daerah/area di dalam wilayah Negara RI sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; serta
- c. Melaksanakan sistem manajemen mutu dan keamanan hasil perikanan.

Memperhatikan keselarasan tugas dan fungsi yang diemban, disamping memperhatikan rencana pemerintah untuk mewujudkan *Good Governance*, BKIPM Kelas I Balikpapan menetapkan visi yang mengadopsi visi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yaitu “Hasil Perikanan Yang Sehat Bermutu, Aman Konsumsi dan Terpercaya”.

Sebagai upaya nyata untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah pernyataan misi BKIPM Kelas I Balikpapan yang menggambarkan hal yang perlu dilaksanakan, sehingga hal yang masih abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut, yaitu “Mewujudkan Pencegahan Penyebaran HPIK Serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Mampu Menjamin Lalu Lintas Hasil Perikanan Yang Sehat, Bermutu, Aman Konsumsi dan Terpercaya”.

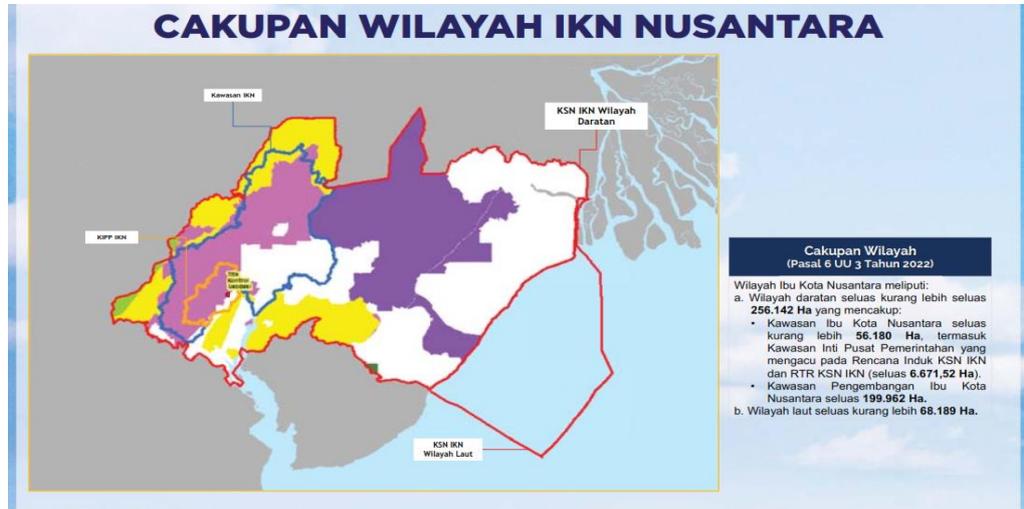
Selanjutnya, sebagai implementasi dari pernyataan misi, BKIPM Kelas I Balikpapan mempunyai tujuan sebagaimana tertuang dalam rencana strategik yakni “Peningkatan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan”.

Tujuan ini diformulasikan untuk mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Balikpapan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki.

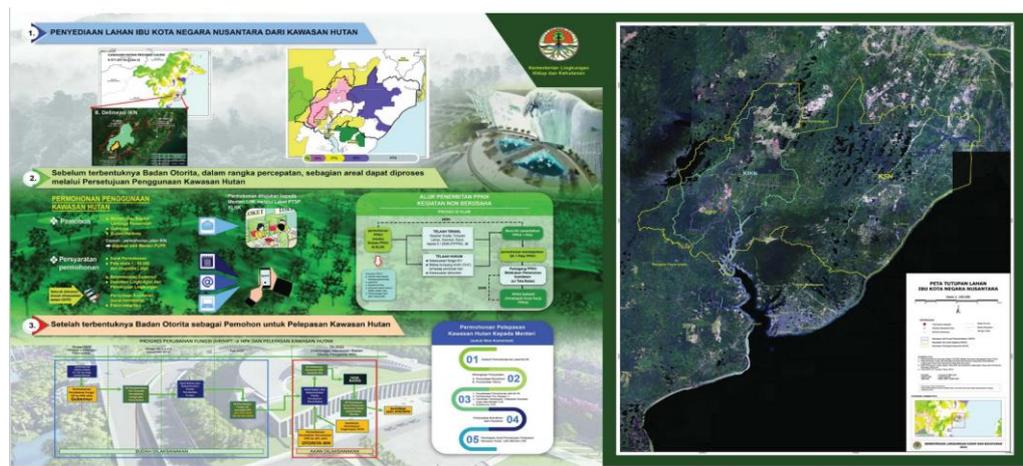
## C. HASIL KUNJUNGAN KERJA

### 1. Peninjauan dan Diskusi di Lokasi Pembangunan IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara.

#### a. Cakupan Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara



#### b. Penyediaan Lahan IKN Nusantara



#### c. Tujuan dan Manfaat Konsep *Forest City*



d. Membangun Hutan Hujan Tropika Basah di Kawasan IKN Nusantara

**MEMBANGUN HUTAN HUJAN TROPIKA BASAH**  
PADA AREAL EKS HTI DI KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN IBU KOTA NEGARA

**REHABILITASI LAHAN TERBUKA & TRANSFORMASI TANAMAN HTI KE ENDEMIK (204 ha)**

**LOKASI RHL KIPP IKN**

**LOKASI LAUNCHING PENANAMAN IKN LUAS 204 HEKTAR**

**Alternatif Pola Penanaman Rumpang**

**REHABILITASI LAHAN TERBUKA & TRANSFORMASI TANAMAN HTI KE ENDEMIK (204 ha)**

**LOKASI LAUNCHING PENANAMAN IKN LUAS 204 HEKTAR**

**Alternatif Pola Penanaman Rumpang**

e. IKN Nusantara dalam Perspektif Keanekaragaman Hayati

**IKN DALAM PERSPEKTIF KEANEKARAGAMAN HAYATI LANSEKAP**

**KORIDOR UTARA**

**KORIDOR SELATAN**

**KEANEKARAGAMAN HAYATI TAHURA BUKIT SOEHARTO**

**KEANEKARAGAMAN HAYATI HUTAN LINDING SUNGAI WAIN**

**KEANEKARAGAMAN HAYATI TELUK BALUKAPAN**

**KEANEKARAGAMAN HAYATI Hutan Produksi PT. INHUTANI 1 BATU AMPAR MENTAWAR**

**KEANEKARAGAMAN HAYATI Hutan Produksi PT. INHUTANI 1 BATU AMPAR MENTAWAR**

f. Pemulihan Lingkungan pada Kawasan IKN Nusantara

**LUBANG TAMBANG DAN RENCANA PEMULIHAN BEKAS TAMBANG**

**STATUS LUBANG TAMBANG**

Status	> 1 ha	1 - 0,2 ha	< 0,2 ha	Total
Dalam Konsesi	60	127	1.776	1.953
Luar Konsesi	63	84	279	432
Total	149	211	2.055	2.385

**KUALITAS TANAH DAN AIR LUBANG**

**STATUS BUKAAN TAMBANG**

Kawasan Hutan	HP	APL	Total
Dalam Konsesi	147	250,2	1.266
Luar Konsesi	148	146,6	160,7

**Konsep Pemulihan:**

- Hutan rawa buatan: koridor satwa dan buffer Tahura
- Agrowisata: air lubang tambang
- Pemanfaatan sumber air: wisata, perikanan, air bersih dan olahraga

**Hal-hal yang perlu ditindak-lanjuti:**

- Izin yang masih berlaku: Kementerian ESDM dan Pemda untuk percepatan reklamasi-pascatambang
- Status izin yang telah berakhir: Pelaksanaan reklamasi – jaminan reklamasi
- Bekas tambang tanpa izin: penanganan lahan terlantar (status lahan)



### Rekomendasi:

- a. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan untuk menyampaikan data Kewajiban Reklamasi masing-masing Pemegang IPPKH Pertambangan, terutama di dalam dan di sekitar Kawasan IKN Nusantara. Data dimaksud agar diserahkan selambatnya 1 bulan sejak Kunjungan Kerja Reses ini dilaksanakan.
- b. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar pelaksanaan Pembangunan IKN Nusantara tetap memegang prinsip konservasi keanekaragaman hayati serta meminimalkan dampak penurunan kualitas lingkungan di dalam dan di sekitar IKN Nusantara.
- c. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan untuk segera menyelesaikan pembangunan Persemaian Permanen Mentawir dengan kapasitas 15 juta batang bibit per tahun untuk dapat mendukung kebutuhan bibit tanaman dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kawasan IKN Nusantara dengan target seluas 1.500 hektar per tahun.
- d. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk fokus melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di dalam dan di sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dalam rangka melaksanakan target pembangunan KIPP sebagai *Smart City* dan *Forest City*, serta dalam rangka percepatan program pemulihan Ekosistem Hutan Tropis Kalimantan yang berada di dalam dan di sekitar Kawasan IKN Nusantara.
- e. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memaksimalkan peran serta dan partisipasi Masyarakat Adat serta masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dalam melaksanakan seluruh program Pembangunan IKN Nusantara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama dalam kegiatan penyiapan bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman.
- f. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk segera menyelesaikan tata batas areal kerja PT ITCI Hutani Manunggal (PT IHM) yang telah dikembalikan kepada negara melalui addendum SK IUPHHK Hutan Tanaman serta terus melaksanakan pengamanan hutan yang telah diserahkan dimaksud. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan untuk segera menyelesaikan target pelaksanaan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Kawasan IKN Nusantara, terutama pada kawasan hutan ex areal kerja PT IHM.

- g. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan inventarisasi terkait potensi konflik tenurial atas pelepasan kawasan hutan untuk Pembangunan Kawasan IKN Nusantara.
- h. Komisi IV DPR RI sepakat untuk melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Persemaian Rumpin di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam rangka studi banding persemaian permanen yang sudah dan sedang dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## **2. Kunjungan dan Diskusi di Lokasi Program Desa Korporasi Sapi (DKS) Kelompok Tani Petani Maju, Desa Labangka Barat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara.**

Pada kegiatan ini, Tim Komisi IV DPR RI mendapatkan penjelasan dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian terkait kegiatan DKS, dimana kegiatan ini merupakan pengembangan sapi bakalan yang dikelola dalam 1 manajemen, dimana 5 kelompok dalam 1 kecamatan dikumpulkan menjadi 1 korporasi berbentuk koperasi dan memiliki *offtaker*. Disampaikan juga, bahwa status sapi yang dimiliki kelompok sudah di asuransikan. Saat ini yang perlu dilakukan adalah akselerasi asuransi ternak, khususnya indukan. Selain mengenai asuransi, hal lain yang harus diperhatikan adalah ketersediaan hijauan dan di support dengan konsentrat untuk bakalan.

Saat ini, dengan adanya kegiatan pengembangan sapi/peningkatan populasi sapi telah terjadi 16% penurunan impor. Meskipun terjadi penurunan, namun masih tergolong lambat. Hal ini menunjukkan populasi indukan yang ada belum bisa memenuhi kebutuhan konsumen (peningkatan populasi masih lambat). Selanjutnya, perlu juga penambahan pejantan untuk mendukung peningkatan populasi melalui mekanisme kawin alam. Harapannya adalah, kegiatan ini menjadi contoh di kabupaten lain, yang harus dikembangkan adalah skala usahanya, seperti melalui KUR. Melalui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara juga dijelaskan bahwa saat ini kontribusi sub sektor peternakan di PPU, PDRB 2,18 T, 0,36% diharapkan dapat lebih ditingkatkan, terutama melalui kegiatan desa korporasi sapi. Diharapkan koperasi tidak saja hanya menjadi *off taker* tapi juga mampu menjadi *avails*.

Pada pertemuan ini, tim Komisi IV DPR RI juga menerima beberapa masukan dan aspirasi dari petani, peternak, hingga dari pihak *off taker*/koperasi, tidak saja terkait kegiatan Desa Korporasi Sapi, namun juga sektor pertanian secara keseluruhan, yaitu:

- a. Mengharapkan terdapat sebuah sistem dan pembinaan dari PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) dalam rangka optimalisasi penggunaan pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Sebagai gambaran, dks memiliki potensi menghasilkan 10 ton kotoran padat dan 3 ton kotoran cair.
- b. Menyampaikan kendala terkait budidaya sapi jenis brahman cross terutama di saat birahi, peternak sulit mendeteksi masa birahi indukan.

Berharap ada pengadaan pejantan ungg non lokal. Saat ini bibit yg ada hanya brahman dan bali, berharap straw yg digunakan utk IB berjenis limosine dan simental.

- c. Menyampaikan potensi pertanian di wilayahnya seluas 350 H dan 500 Ha utk perkebunan. Oleh karena itu, butuh tambahan bantuan, karena dua tahun terakhir peruntukan dana desa dialokasikan utk penanganan COVID. Hal-hal yang dibutuhkan antara lain peningkatan JUT hingga 20 KM, peningkatan JIT, dan peningkatan infrastruktur perkebunan (jalan produksi).
- d. Menyampaikan pertanyaan tentang pangan, dan rendahnya penyerapan beras petani oleh BULOG, serta rendahnya harga beli/HPP yang di bawah harga pasar. Sehingga dikawatirkan petani kehilangan minat menanam padi dan menjadi alih fungsi lahan menjadi perkebunan. Secara khusus meminta Pemerintah tidak hanya memperhatikan sektor produksinya saja, melainkan juga pemasarannya.
- e. Menyampaikan sudah 3 tahun menjadi *off taker* dan sudah bekerja sama dengan perbankan untuk itu, diharapkan ada kemudahan dalam mengakses KUR.

Beberapa tanggapan terhadap masukan dan aspirasi yang disampaikan, yaitu:

- a. PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) akan membantu dan memberikan dukungan untuk pengembangan pupuk organik, dalam hal ini di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b. Terkait aspirasi mengenai pejantan, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian sudah mengalokasikan melalui APBN, selanjutnya meminta agar terjadi sinergitas dukungan baik melalui APBD provinsi dan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara. Selanjutnya menyampaikan terkait akses pejantan murah dapat dibeli di UPT peternakan yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian. Terkait straw, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari dan Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang memiliki 4 juta dosis dan tersedia semua jenis yang siap didistribusikan kepada peternak.
- c. Perum BULOG menyampaikan terkait rendahnya pengadaan, yang diakui masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kualitas yang tidak sesuai kriteria yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan dalam hal peruntukan beras untuk KPSH. Kedepan diharapkan sinergi dengan ASN untuk meningkatkan penyerapan beras di kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu diharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk revitalisasi penggilingan padi.
- d. Terkait KUR, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyampaikan salah satu indikator keberhasilan kegiatan pengembangan desa korporasi sapi adalah tidak lagi tergantung dengan APBN sehingga diantaranya dapat disupport melalui KUR agar

berkembang lebih optimal, yang pada tahun 2022 memiliki target Rp15 Triliun Setelah sebelumnya mencapai target Rp12 Triliun.

#### Rekomendasi:

Komisi IV DPR RI menyadari adanya keterbatasan dan perbedaan karakteristik infrastruktur yg terdapat di luar Jawa dibandingkan dengan di Jawa. Untuk itu, Komisi IV DPR RI akan mendorong peningkatan JUT dan JIT dalam hal ini di Kabupaten Penajam Paser Utara.

### 3. Kunjungan dan Diskusi di Gudang BULOG Klandasan Ilir, Kota Balikpapan.

Pada pertemuan ini disampaikan oleh Perum BULOG dan PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) bahwa secara umum stok pangan dan stok pupuk di Kalimantan Timur cukup untuk memenuhi kebutuhan. Khusus untuk beras, disampaikan bahwa beras untuk Kalimantan Timur masih di suplai dari daerah lain (masih defisit).

#### Rekomendasi:

- Menanggapi aspirasi dari petani pada saat pertemuan di lokasi Desa Korporasi Sapi Kabupaten Penajam Paser Utara, Tim Komisi IV DPR RI meminta Perum BULOG harus memiliki program peningkatan kualitas beras dan harus melakukan percepatan untuk meningkatkan penyerapan beras di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Menanggapi aspirasi petani terkait pupuk organik yang disampaikan pada pertemuan di lokasi Desa Korporasi Sapi Kabupaten Penajam Paser Utara, Tim Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) untuk membantu dan memberikan dukungan penuh kepada petani dalam rangka pengembangan pupuk organik, dalam hal ini di Kabupaten Penajam Paser Utara.

### 4. Kunjungan dan Diskusi di Kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kelas I Balikpapan, Kota Balikpapan.

- Statistik Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Kalimantan Timur

#### Statistik Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan



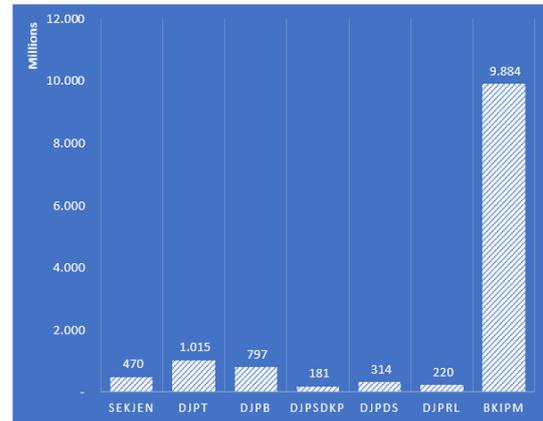
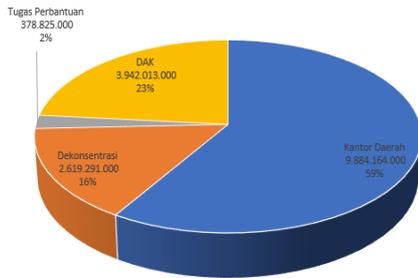
Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Pembesaran	Pembenihan (ekor)	Ikan Hias (ekor)
	Kabupaten/Regency		
1. Paser	14.011	2.390	
2. Kutai Barat	2.177	193	4.560
3. Kutai Kartanegara	126.139	832.252	1.845.900
4. Kutai Timur	916		
5. Berau	2.380	5.105	
6. Penajam Paser Utara	8.976	17.160	
7. Mahakam Ulu	3		
Kota/Municipality			
1. Balikpapan	486	337.833	25.718
2. Samarinda	737	36.301	95.526
3. Bontang	4.414	66	87.600
<b>Kalimantan Timur (2021)</b>	<b>160.240</b>	<b>1.231.300</b>	<b>2.059.304</b>
2020	160.244	1.014.100	1.741.717
2019	143.508	1.188.828	1.585.600
2018	151.914	1.237.538	...

b. Alokasi Anggaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

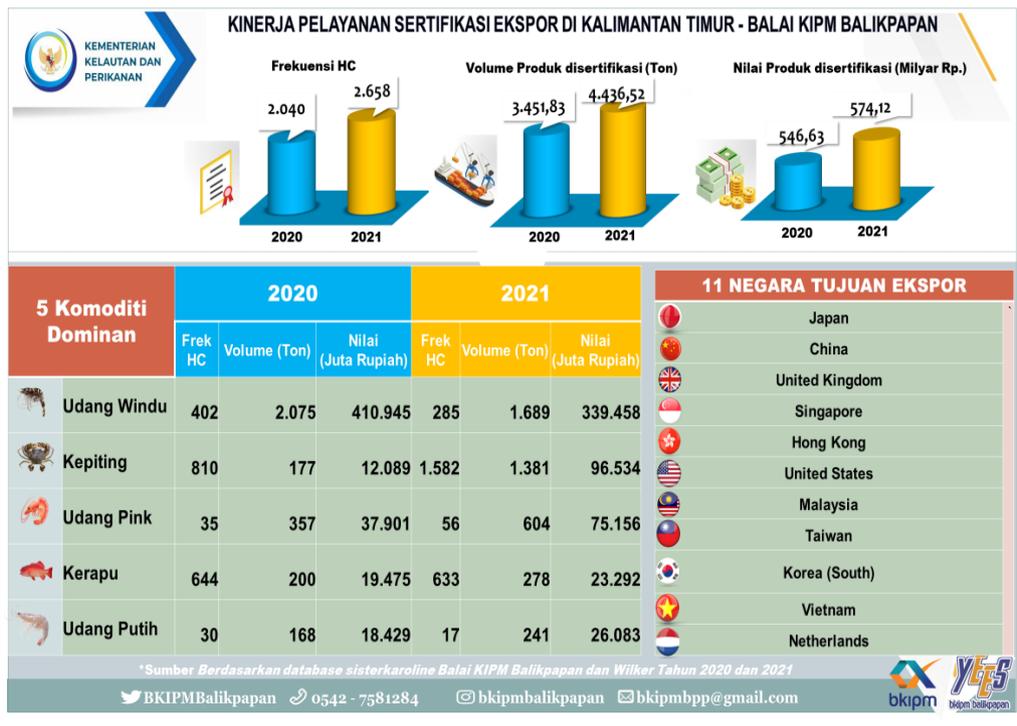
**ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DI PROP KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022**

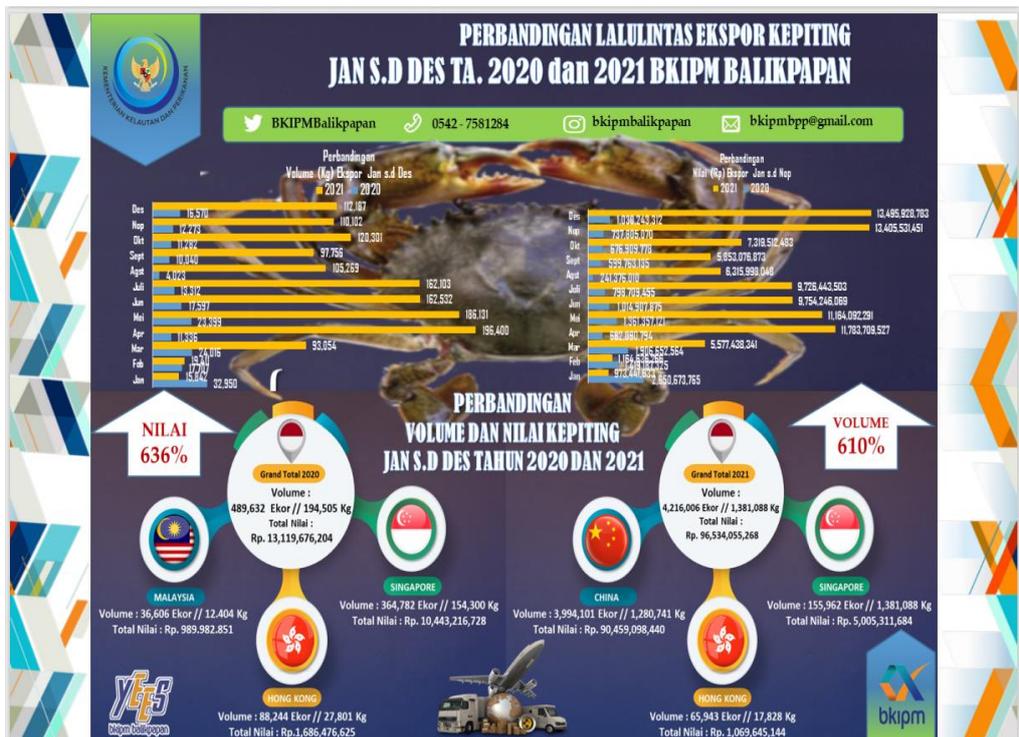
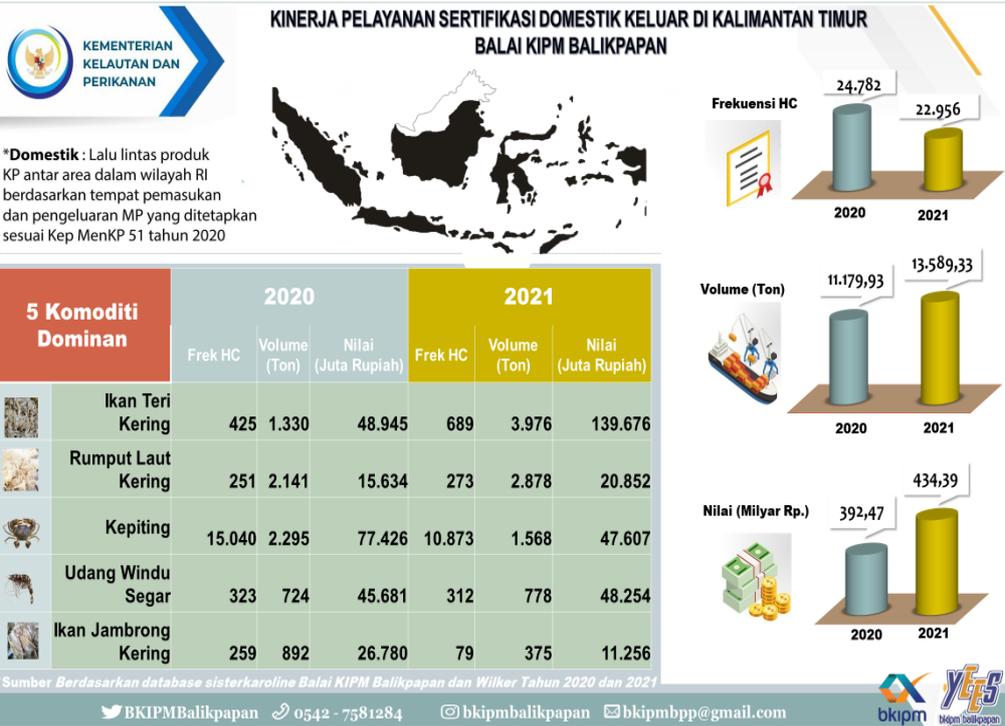


**Rp. 16,82 M**



c. Kinerja BKIPM Kelas I Balikpapan





d. Permasalahan yang Dihadapi oleh BKIPM Kelas I Balikpapan



**PERMASALAHAN**

**Teknis Internal**

Peningkatan pelaku usaha perikanan yang melakukan kegiatan pengiriman ikan keluar dari Provinsi Kalimantan Timur, saat ini telah terdaftar di KUSUKA KKP sebanyak 329 Pelaku Usaha, terdapat 9 Unit Pengolah Ikan dan 45 Unit Usaha Pembudidaya Ikan.

Meningkatnya frekuensi kegiatan lalulintas komoditas perikanan berdampak pada kecepatan, ketepatan dan kepastian hasil uji sampel yang diperiksa. Laboratorium menjadi sarana yang utama dalam memberikan jaminan kesehatan dan mutu hasil perikanan

Ketersediaan fasilitas sarana gedung Laboratorium, alat alat laboratorium serta bahan uji menjadi keharusan dalam menghasilkan hasil uji yang valid. Saat ini Balai KIPM Balikpapan sangat membutuhkan pengembangan sarana gedung laboratorium, peremajaan alat alat laboratorium serta ketersediaan bahan uji dengan pemenuhan anggaran yang dibutuhkan, supaya kecepatan, ketepatan, kepastian terhadap pemberian jaminan kesehatan dan mutu hasil perikanan yang dilalulintaskan dapat dipenuhi.

**Teknis Eksternal**

Membandingkan data infografis lalulintas komoditas perikanan Tahun 2021 yang keluar dari Provinsi Kalimantan Timur dengan tahun 2020, terdapat peningkatan baik frekuensi, volume dan nilai. Peningkatan frekuensi maupun volume ekspor seharusnya masih dapat ditingkatkan lagi, namun saat ini masih terdapat kendala dengan adanya batasan dalam pemenuhan kuota angkut ekspor melalui pesawat udara. Volume yang terangkut hanya 8 Ton per hari dengan nilai berkisar Rp. 800.000.000,- yang semestinya dapat mencapai 15 Ton dengan nilai berkisar Rp. 1,5 Milyar per hari.

Peningkatan volume dan nilai komoditas perikanan yang di ekspor akan berdampak memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan nelayan, pembudidaya, supplier, UPI/UUPI

**Rekomendasi:**

- Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kajian teknis atas rencana penetapan status Pandemi COVID-19 menjadi Endemi COVID-19 terhadap dampak pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia sesuai syarat/standar yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor hasil perikanan.
- Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan pengembangan sarana gedung laboratorium, peremajaan alat alat laboratorium, serta ketersediaan bahan uji dengan pemenuhan melalui dukungan alokasi anggaran pada BKIPM Kelas I Balikpapan dalam rangka menjamin kecepatan, ketepatan, dan kepastian atas jaminan kesehatan dan mutu hasil perikanan yang dilalulintaskan yang harus dipenuhi.
- Komisi IV DPR RI mendorong dilakukannya peningkatan volume dan nilai ekspor komoditas perikanan yang melalui pintu keluar BKIPM Kelas I Balikpapan, dalam rangka memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pemasok, serta Pemegang Izin UPI/UUP.

#### IV. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan untuk menyampaikan data Kewajiban Reklamasi masing-masing Pemegang IPPKH Pertambangan, terutama di dalam dan di sekitar Kawasan IKN Nusantara. Data dimaksud agar diserahkan selambatnya 1 bulan sejak Kunjungan Kerja Reses ini dilaksanakan.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar pelaksanaan Pembangunan IKN Nusantara tetap memegang prinsip konservasi keanekaragaman hayati serta meminimalkan dampak penurunan kualitas lingkungan di dalam dan di sekitar IKN Nusantara.
3. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memaksimalkan peran serta dan partisipasi Masyarakat Adat serta masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dalam melaksanakan seluruh program Pembangunan IKN Nusantara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama dalam kegiatan penyiapan bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk segera menyelesaikan tata batas areal kerja PT ITCI Hutani Manunggal (PT IHM) yang telah dikembalikan kepada negara melalui addendum SK IUPHHK Hutan Tanaman serta terus melaksanakan pengamanan hutan yang telah diserahterimakan dimaksud. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan untuk segera menyelesaikan target pelaksanaan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Kawasan IKN Nusantara, terutama pada kawasan hutan ex areal kerja PT IHM.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan inventarisasi terkait potensi konflik tenurial atas pelepasan kawasan hutan untuk Pembangunan Kawasan IKN Nusantara.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian antara lain berupa akses Jalan Usaha Tani, Jaringan Irigasi Teknis, Alat dan Mesin Pertanian, serta bibit/benih pertanian/peternakan termasuk pejantan dan straw dengan harga terjangkau yang dapat diakses dengan mudah oleh peternak dalam hal ini di Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Komisi IV DPR RI meminta Perum BULOG harus memiliki program peningkatan kualitas beras dan harus melakukan percepatan untuk meningkatkan penyerapan beras di Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Komisi IV DPR RI meminta Perum BULOG untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan ASN dalam rangka percepatan penyerapan beras khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta mendorong Pemerintah Daerah untuk mendukung revitalisasi penggilingan padi di Kabupaten Penajam Paser Utara.

9. Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) untuk membantu dan memberikan dukungan penuh kepada petani dalam rangka pengembangan pupuk organik, dalam hal ini di Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kajian teknis atas rencana penetapan status Pandemi COVID-19 menjadi Endemi COVID-19 terhadap dampak pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia sesuai syarat/standar yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor hasil perikanan.
11. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan pengembangan sarana gedung laboratorium, peremajaan alat alat laboratorium, serta ketersediaan bahan uji dengan pemenuhan melalui dukungan alokasi anggaran pada BKIPM Kelas I Balikpapan dalam rangka menjamin kecepatan, ketepatan, dan kepastian atas jaminan kesehatan dan mutu hasil perikanan yang dilalulintaskan yang harus dipenuhi.
12. Komisi IV DPR RI mendorong dilakukannya peningkatan volume dan nilai ekspor komoditas perikanan yang melalui pintu keluar BKIPM Kelas I Balikpapan, dalam rangka memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pemasok, serta Pemegang Izin UPI/UUP.

## V. PENUTUP

Demikian Laporan melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi dari beberapa pihak serta rekomendasi dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama Mitra Kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 25 April 2022

Ketua Tim,

Ttd.

**G. Budisatrio Djiwandono**

A-127

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



## LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38673/t/javascript;>

<https://wartaekonomi.co.id/read408832/anggota-komisi-iv-dpr-ri-sarankan-reboisasi-harus-berjalan-di-ikn>

[https://www.google.com/search?q=komisi+iv+ikn&rlz=1C1CHBD\\_idID905ID905&oq=komisi+iv+&aqs=chrome.2.35i39j69i57j35i39j0i512l2j69i60l2j69i65.5015j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=komisi+iv+ikn&rlz=1C1CHBD_idID905ID905&oq=komisi+iv+&aqs=chrome.2.35i39j69i57j35i39j0i512l2j69i60l2j69i65.5015j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

<https://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-minta-reboisasi-hutan-di-ikn-berjalan-dengan-baik.html>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4944443/kementan-jalankan-program-korporasi-sapi-komisi-iv-dpr-ri-beri-apresiasi>

<https://nasional.tempo.co/read/1584236/komisi-iv-apresiasi-program-desa-korporasi-sapi>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38705/t/Desa+Korporasi+Sapi+Bisa+Penuhi+Kebutuhan+Daging+Sapi>

<http://troboslivestock.com/detail-berita/2022/04/21/57/15854/desa-korporasi-sapi-di-penajam-paser-utara>

<https://www.kompas.tv/article/281535/komisi-iv-dpr-ri-koordinasi-dengan-BULOG-untuk-kebutuhan-pangan-di-kaltim>

<https://kalimantan.bisnis.com/read/20220420/407/1524776/komisi-iv-dpr-ri-minta-pemprov-kaltim-genjot-serapan-pangan-lokal>

<https://www.inibalikpapan.com/tinjau-gudang-BULOG-kaltimra-komisi-iv-ingatkan-BULOG-serap-produksi-petani-kaltim/>

<http://www.BULOG.co.id/>

[https://twitter.com/dpr\\_ri/status/860155728815767554](https://twitter.com/dpr_ri/status/860155728815767554)

<https://kkp.go.id/bkipm/artikel/40081-dpr-ri-dukung-kkp-bangun-perikanan-kaltim>

<https://www.youtube.com/watch?v=a-vaZA7Dv4Y>